

Analysis of Attitudes Toward Persons with Disabilities and the Need for Inclusive Education Services in Soppeng District

Usman

Universitas Negeri Makassar
Email: usman6609@unm.ac.id

Abstract. This study aims to get a picture of the attitude profiles of teachers, bureaucrats and regents towards children with disabilities (Children with Special Needs) and the need for inclusive education services in Soppeng Regency. This research uses a quantitative-descriptive approach by applying survey methods. The results found that the three components of attitude (Cognitive, Affective and Conative) are consistent and consistent, which is empirically proven based on respondents' answers to the three components of attitude showing an average percentage above 82% is a positive response (favorable) to the attitude object that is answered by respondents. Conclusions from the results of this study: (1) on the Cognitive component; 83.54% of teachers responded positively, 83.2% of the Education Office bureaucrats responded positively, and 81.5% positive responses from the Regent, (2) on the Affective Component; 86.96% of teachers responded positively, 87.3% of the Education Office Bureaucrats responded positively, and 100% positive responses from the Regent. (3) on the Conative component; 84.13% of teachers responded positively, 86.4% of the Education Office bureaucrats responded positively, and 90% responded positively from the Regent. The implication is that the implementation of inclusive education services is very likely to run successfully if implemented in Soppeng. Regency because there has been a positive attitude towards people with disabilities and inclusive education services.

Keywords: Attitude, Children with Disabilities, Inclusive Education

PENDAHULUAN

Komitmen pemerintah yang terefleksi dalam berbagai kebijakan tentu sangat diharapkan dapat benar-benar terwujud dalam praktek pendidikan agar esensi kebijakan tersebut mampu menterjemahkan berbagai regulasi atau sistem hukum/perundang-undangan yang ada.

Berbagai payung hukum memberi pesan yang sangat terang agar semua warga negara tidak terkecuali anak-anak berkebutuhan khusus (*children with special needs*) atau penyandang disabilitas sebagaimana disebutkan di dalam UU No. 8 tahun 2016; dapat memperoleh hak dan akses yang sama (tanpa diskriminasi), khususnya aksesibilitas dalam bidang pendidikan dalam rangka memenuhi hak pendidikan untuk semua (*education for all*).

Disamping itu juga tercermin dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Sul-Sel No. 31 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Prov. Sul-Sel, serta secara eksplisit juga nampak jelas dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sul-Sel

No. 2 tahun 2016 Bagian keempat pasal 27, ayat (3) yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan khusus, secara tegas menyebutkan bahwa "anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan umum dan/atau satuan pendidikan kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk pendidikan inklusif.

Indikator pendidikan ini sangat penting bagi pemerintah (termasuk di dalamnya Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi), hal ini nampak dengan ditetapkannya isu pendidikan sebagai salah satu diantara 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia, yang menetapkan upaya pencapaian "Pendidikan berkualitas" (*Quality Education*), yaitu menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang".

Tujuan tersebut nampaknya memiliki linieritas dengan salah satu tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), yaitu "Perluasan Akses Pendidikan Dasar yang bermutu". Untuk mencapai tujuan tersebut, Kemendikbud memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu: "Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB".

Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) maupun tujuan dan sasaran strategis Kemedikbud di atas nampak jelas juga telah tertuang dalam Penetapan visi Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 merupakan dukungan terhadap pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Soppeng yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021, dengan visi "Pemerintahan yang melayani dan lebih baik". Sedangkan misi yang terkait dengan penyelenggaraan urusan di bidang pendidikan adalah "Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga" dengan fokus pada upaya umum untuk meningkatkan kualitas pendidikan di satu sisi serta dapat diakses dengan murah dan berkeadilan pada sisi lainnya.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah (PEMDA) khususnya PEMDA Kabupaten Soppeng untuk mengakselerasi pencapaian visi dan misi dalam bidang pendidikan sebagaimana dikemukakan di atas adalah melalui penerapan layanan Pendidikan yang inklusif. Menurut peneliti, solusi yang dikemukakan ini sangat relevan dengan berbagai landasan yuridis yang menjadi dasar hukum pentingnya pelaksanaan pendidikan inklusif dilaksanakan. Dasar hukum yang dimaksud antara lain adalah: UUD 1945 (amandemen) Pasal 31, UU No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS, Pasal 5, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 16 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Peraturan Menteri (Permendiknas, No. 70 Tahun 2009) serta berbagai Deklarasi Nasional maupun Internasional.

Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya (Sapon-Shevin dalam O'Neil, 1995, dalam Budiyanto, 2005). Oleh karena itu ditekankan adanya restrukturisasi sekolah sehingga menjadi

komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus setiap anak, artinya kaya dalam sumber belajar dan mendapat dukungan dari semua pihak, yaitu para siswa, guru, orang tua dan masyarakat sekitarnya. pendapat di atas sejalan dengan Permendiknas, No. 70 Tahun 2009, Pasal 1 yang menetapkan bahwa: "yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya".

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan layanan pendidikan inklusif pada semua jenjang pendidikan di Kabupaten Soppeng adalah suatu program yang sangat urgen, terutama jika dikaitkan dengan RENSTRA dan Visi-Misi yang sudah dicanangkan oleh PEMDA, khususnya Dinas Pendidikan Kab. Soppeng sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah yang diharapkan mampu menterjemahkan hakikat substansi Visi-Misi tersebut dan mengimplementasikannya dalam program nyata di lapangan.

Oleh karena itu, peneliti menganggap sangat urgen dilakukan kajian melalui suatu penelitian untuk mengungkap secara empiris tentang sikap para guru dan pihak lain yang terkait (khususnya Kepala Daerah dan birokrat pada dinas pendidikan) terhadap anak didik penyandang disabilitas dan kebutuhan layanan pendidikannya. Penelitian seperti ini belum pernah dilakukan sebelumnya di Kabupaten Soppeng sehingga data atau informasi dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemda Kabupaten Soppeng dalam upaya mensinkronisasikan berbagai program pendidikan dalam rangka memaksimalkan pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Soppeng yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.

Sikap merupakan produk dari proses sosialisasi dimana seseorang bereaksi sesuai dengan rangsang yang diterimanya. Jika sikap mengarah pada objek tertentu, berarti bahwa penyesuaian diri terhadap objek tersebut dipengaruhi lingkungan sosial dan kesediaan untuk bereaksi dari orang tersebut terhadap objek. Objek sikap dalam penelitian ini adalah anak penyandang disabilitas (ABK) dan layanan pendidikan inklusifnya.

Menurut Mar'at (1984), sikap diartikan sebagai suatu konstruk untuk memungkinkan terlihatnya suatu aktivitas. Manifestasi sikap tidak dapat langsung dilihat, akan tetapi harus ditafsirkan terlebih dahulu sebagai tingkah laku yang masih tertutup. Secara operasional pengertian sikap menunjukkan konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap kategori stimulus tertentu dan dalam penggunaan praktis, sikap sering dihadapkan dengan rangsang sosial dan reaksi yang bersifat emosional. Mar'at (1984); Azwar (1995) lebih lanjut mengemukakan bahwa sikap memiliki tiga komponen yaitu: 1) komponen kognisi yang hubungannya dengan *beliefs*, ide dan konsep; 2) komponen afeksi yang menyangkut kehidupan emosional

seseorang; dan 3) komponen konasi yang merupakan kecenderungan bertingkah laku.

Konsep anak berkebutuhan khusus (*children with special needs*) memiliki makna dan spektrum yang lebih luas dibandingkan dengan konsep anak luar biasa (*exceptional children*). Anak berkebutuhan khusus sebagai peserta didik umumnya mengalami hambatan untuk dapat mengikuti pembelajaran sebagaimana peserta didik umumnya. Hambatan atau gangguan yang dialaminya tersebut dapat bersifat temporer dan bersifat permanen. Bersifat temporer, yaitu mereka yang tidak perlu mendapat layanan pendidikan khusus secara terus-menerus.

Mereka akan dapat keluar dari hambatan yang dialaminya jika faktor-faktor yang melatarbelakanginya dapat diatasi. Oleh karena itu, layanan pendidikan yang diberikan tidak bersifat khusus lagi. Namun demikian, apabila anak berkebutuhan khusus temporer tidak mendapatkan penanganan atau intervensi yang tepat, maka kebutuhan khususnya dapat menjadi permanen.

Sedangkan yang bersifat permanen, yaitu mereka yang karena hambatannya itu perlu mendapatkan layanan secara lebih khusus berdasarkan tingkat kebutuhannya. Hambatan atau gangguan yang dialaminya lebih disebabkan karena faktor internal yang ada pada anak, seperti mereka yang kehilangan kemampuan penglihatan, pendengaran, atau gangguan kecerdasan. Dikatakan permanen karena fisik dan mental mereka tidak dapat diubah seperti anak umumnya. Namun demikian jika dilihat dari kemandiriannya, tidak sedikit kelompok ini dapat beradaptasi dengan lingkungan tanpa perlu bantuan secara khusus. Mereka dapat belajar, berkomunikasi, dan melakukan kegiatan sehari-hari tanpa bantuan orang lain.

Setiap anak berkebutuhan khusus, baik yang bersifat permanen maupun yang temporer, memiliki hambatan belajar dan kebutuhan yang berbeda-beda. Untuk itu diperlukan upaya-upaya penyesuaian dalam pembelajarannya.

Dalam konsep pendidikan luar biasa, pendidikan inklusif diartikan sebagai penggabungan penyelenggaraan pendidikan luar biasa dan pendidikan biasa dalam satu sistem yang dipersatukan. Adapun yang dimaksud pendidikan luar biasa adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi siswa luar biasa atau berkelainan baik dalam makna dikaruniai keunggulan (*gifted/talented*) maupun karena adanya hambatan fisik, sensorik, motorik, intelektual, emosi, dan atau sosial.

Dalam setting pendidikan inklusif pengkategorian peserta didik ke dalam kelompok normal dan berkelainan ditiadakan. Pengkategorian dipandang sebagai biang keladi penyebab pelabelan, dan pelabelan sebagai biang keladi penyebab rasa malu dan rendah diri bagi peserta didik yang berkekurangan dan arogansi bagi yang memiliki keunggulan. Padahal dalam kenyataan kehidupan orang berkekurangan dapat pula dikaruniai keunggulan dan sebaliknya, orang yang memperoleh predikat unggul tidak luput dari kekurangan.

Pendidikan inklusif memandang kebhinnekaan sebagai anugerah, yang memungkinkan manusia dapat saling berhubungan dalam rangka saling membutuhkan. Proses belajar tidak hanya terjadi antara guru dengan siswa tetapi

juga dengan sesama siswa dan sumber belajar lainnya. Oleh karena itu, kelompok belajar harus heterogen, agar peserta didik satu satu sama lain dapat saling belajar.

Implikasi terhadap layanan pendidikan bagi peserta didik yang menyandang disabilitas (ABK) adalah: (1) Tidak diskriminatif; pengakuan terhadap keberagaman, (2) Memperhatikan kebutuhan peserta didik; masalah bukan pada anak tetapi pada lingkungan, (3) Lingkungan dan fasilitas yang aksesibel; (4) Kerjasama tim; masalah yang dihadapi akan lebih mudah diatasi secara tim, (5)

Peran serta orang tua; orang tua diposisikan sebagai kelompok dukungan (*parent support groups*), (6) Sistem pendukung (*support system*); sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif membutuhkan sistem dukungan (*resource center*). Salah satu tugas dan fungsi pusat sumber adalah menyediakan guru pendidikan kebutuhan khusus yang profesional yang disebut guru kunjung (*inteneran teachers*) yang menjadi mitra guru di sekolah reguler.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif-deskriptif dengan menerapkan metode Survei. Definisi Operasioanal Variabel penelitian adalah: Sikap responden adalah respon sampel penelitian yang dipengaruhi oleh komponen kognitif, komponen afektif dan komponen konatifnya terhadap penyandang disabilitas (ABK) dengan berbagai permasalahannya dan sikap terhadap layanan pendidikan inklusif.

Populasi penelitian ini adalah seluruh guru Sekolah Dasar (SD), guru SDLB Negeri dan SLB Swasta yang tersebar pada 8 Kecamatan, seluruh pegawai pada Dinas Pendidikan Kab. Soppeng dan Kepala daerah di Kab. Soppeng. Sampel penelitian ditarik dari populasi dengan teknik *multi stage random sample* dengan cara *equal probability*, yaitu tiap kelompok populasi dari tiap kecamatan dipilih sejumlah anggota tertentu untuk dimasukkan dalam sampel dan tiap anggota kelompok tersebut mempunyai probabilitas yang sama untuk dimasukkan ke dalam sampel (Nazir, 1988); Creswell (2013).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *Questioner* yang berbentuk skala Likert, merupakan metode penskalaan pernyataan sikap yang menggunakan distribusi respons sebagai dasar penentuan nilai skalanya (Azwar, 1995). Responden diminta untuk memilih jawaban dengan cara memberi tanda cek (V) pada pilihan jawaban yang paling sesuai dengan pendapatnya atau keadaan dirinya/kesetujuan atau ketidaksetujuannya terhadap isi pernyataan dalam empat macam kategori jawaban, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Setuju (S) dan Sangat Setuju (SS).

Data yang diperoleh melalui *Questioner* dianalisis dengan cara: setiap pernyataan responden akan diberi skor sesuai dengan nilai skala kategori jawaban, yaitu untuk pernyataan yang *favorable* penskorannya adalah: untuk kategori jawaban: STS diberi skor 1, TS diberi skor 2, S diberi skor 3 dan SS diberi skor 4. Sementara untuk pernyataan yang *unfavorable* penskorannya dibalik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Profil Komponen Kognitif Responden Kecamatan Lilirilau

		F	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	6	1,5	1,5	1,5
	TS	57	14,1	14,1	15,6
	S	249	61,5	61,5	77,0
	SS	93	23,0	23,0	100,0
	Total	405	100,0	100,0	

Tabel 2. Profil Komponen Afektif Responden Kecamatan Lilirilau

		F	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	4	,8	,8	,8
	TS	61	11,9	11,9	12,7
	S	305	59,5	59,5	72,1
	SS	143	27,9	27,9	100,0
	Total	513	100,0	100,0	

Tabel 3. Profil Komponen Konatif Responden Kecamatan Lilirilau

		F	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	4	,8	,8	,8
	TS	80	15,6	15,6	16,4
	S	286	55,8	55,8	72,1
	SS	143	27,9	27,9	100,0
	Total	513	100,0	100,0	

2. Data Responden Kecamatan Citta

Tabel 4. Profil Komponen Kognitif Responden Kecamatan Citta

		F	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	,8	,8	,8
	TS	45	11,9	11,9	12,7
	S	269	71,2	71,2	83,9
	SS	61	16,1	16,1	100,0
	Total	378	100,0	100,0	

Tabel 5. Profil Komponen Afektif Responden Kecamatan Citta

		F	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	5	1,0	1,0	1,0
	TS	64	12,5	12,5	13,5
	S	302	58,9	58,9	72,3
	SS	142	27,7	27,7	100,0
	Total	513	100,0	100,0	

Tabel 6. Profil Komponen Konatif Responden Kecamatan Citta

		F	Percent	Valid Percent	Cumulative Percen
Valid	STS	4	,8	,8	,8
	TS	76	14,8	14,8	15,6
	S	291	56,7	56,7	72,3
	ST	142	27,7	27,7	100,0
	Total	513	100,0	100,0	

3. Data Responden Kecamatan Marioriwawo

Tabel 7. Profil Komponen Kognitif Responden Kecamatan Marioriwawo

		F	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	9	2,4	2,4	2,4
	TS	55	14,6	14,6	16,9
	S	197	52,1	52,1	69,0
	SS	117	31,0	31,0	100,0
	Total	378	100,0	100,0	

Tabel 8. Profil Komponen Afektif Responden Kecamatan Marioriwawo

		F	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	6	1,2	1,2	1,2
	TS	53	10,3	10,3	11,5
	S	260	50,7	50,7	62,2
	SS	194	37,8	37,8	100,0
	Total	513	100,0	100,0	

Tabel 9. Profil Komponen Konatif Responden Kecamatan Marioriwawo

		F	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	10	1,9	1,9	1,9
	TS	62	12,1	12,1	14,0
	S	267	52,0	52,0	66,1
	SS	174	33,9	33,9	100,0
	Total	513	100,0	100,0	

4. Data Responden Kecamatan Marioriawa

Tabel 10. Profil Komponen Kognitif Responden Kecamatan Marioriawa

		F	Percent	Valid Percent	Cumulative Percen
Valid	STS	2	,5	,5	,5
	TS	52	13,8	13,8	14,3
	S	233	61,6	61,6	75,9
	ST	91	24,1	24,1	100,0
	Total	378	100,0	100,0	

Tabel 11. Profil Komponen Afektif Responden Kecamatan Marioriawa

		F	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	5	1,0	1,0	1,0
	TS	53	10,3	10,3	11,3
	S	285	55,6	55,6	66,9
	ST	170	33,1	33,1	100,0
	Total	513	100,0	100,0	

Tabel 12. Profil Komponen Konatif Responden Kecamatan Marioriawa

		F	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	4	,8	,8	,8
	TS	74	14,4	14,4	15,2
	S	285	55,6	55,6	70,8
	ST	150	29,2	29,2	100,0
	Total	513	100,0	100,0	

5. Data Responden Kecamatan Liriaja

Tabel 13. Profil Komponen Kognitif Responden Kecamatan Liriaja

		F	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	17	4,2	4,2	4,2
	TS	84	20,7	20,7	24,9
	S	204	50,4	50,4	75,3
	SS	100	24,7	24,7	100,0
	Total	405	100,0	100,0	

Tabel 14. Profil Komponen Afektif Responden Kecamatan Liriaja

		F	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	12	2,3	2,3	2,3
	TS	78	15,2	15,2	17,5
	S	262	51,1	51,1	68,6
	SS	161	31,4	31,4	100,0
	Total	513	100,0	100,0	

Tabel 15. Profil Komponen Konatif Responden Kecamatan Liriaja

		F	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	13	2,5	2,5	2,5
	TS	66	12,9	12,9	15,4
	S	275	53,6	53,6	69,0
	SS	159	31,0	31,0	100,0
	Total	513	100,0	100,0	

6. Data Responden Kecamatan Donri-Donri

Tabel 16. Profil Komponen Kognitif Responden Kecamatan Donri-Donri

		F	Percent	Valid Percent	Cumulative Percen
Valid	STS	9	3,7	3,7	3,7
	TS	34	14,0	14,0	17,7
	S	141	58,0	58,0	75,7
	SS	59	24,3	24,3	100,0
	Total	243	100,0	100,0	

Tabel 17. Profil Komponen Afektif Responden Kecamatan Donri-Donri

		F	Percent	Valid Percent	Cumulative Percen
Valid	STS	7	1,4	1,4	1,4
	TS	62	12,1	12,1	13,5
	S	260	50,7	50,7	64,1
	SS	184	35,9	35,9	100,0
	Total	513	100,0	100,0	

Tabel 18. Profil Komponen Konatif Responden Kecamatan Donri-Donri

		F	Percent	Valid Percent	Cumulative Percen
Valid	STS	8	1,6	1,6	1,6
	TS	69	13,5	13,5	15,0
	S	279	54,4	54,4	69,4
	SS	157	30,6	30,6	100,0
	Total	513	100,0	100,0	

7. Data Responden Kecamatan Ganra

Tabel 19. Profil Komponen Kognitif Responden Kecamatan Ganra

		F	Percent	Valid Percent	Cumulative Percen
Valid	STS	16	3,1	3,1	3,1
	TS	72	14,0	14,0	17,2
	S	252	49,1	49,1	66,3
	SS	173	33,7	33,7	100,0
	Total	513	100,0	100,0	

Tabel 20. Profil Komponen Afektif Responden Kecamatan Ganra

		F	Percent	Valid Percent	Cumulative Percen
Valid	STS	11	2,1	2,1	2,1
	TS	56	10,9	10,9	13,1
	S	247	48,1	48,1	61,2
	SS	199	38,8	38,8	100,0
	Total	513	100,0	100,0	

Tabel 21. Profil Komponen Konatif Responden Kecamatan Ganra

		F	Percent	Valid Percent	Cumulative Percen
Valid	STS	6	1,2	1,2	1,2
	TS	65	12,7	12,7	13,8
	S	262	51,1	51,1	64,9
	SS	180	35,1	35,1	100,0
	Total	513	100,0	100,0	

8. Data Responden Kecamatan Lalabata

Tabel 22. Profil Komponen Kognitif Responden Kecamatan Lalabata

		F	Percent	Valid Percent	Cumulative Percen
Valid	STS	4	,8	,8	,8
	TS	70	13,6	13,6	14,4
	S	267	52,0	52,0	66,5
	SS	172	33,5	33,5	100,0
	Total	513	100,0	100,0	

Tabel 23. Profil Komponen Afektif Responden Kecamatan Lalabata

		F	Percent	Valid Percent	Cumulative Percen
Valid	STS	5	1,0	1,0	1,0
	TS	54	10,5	10,5	11,5
	S	257	50,1	50,1	61,6
	SS	197	38,4	38,4	100,0
	Total	513	100,0	100,0	

Tabel 24. Profil Komponen Konatif Responden Kecamatan Lalabata

		F	Percent	Valid Percent	Cumulative Percen
Valid	STS	16	3,1	3,1	3,1
	TS	95	18,5	18,5	21,6
	S	263	51,3	51,3	72,9
	SS	139	27,1	27,1	100,0
	Total	513	100,0	100,0	

9. Data Responden Birokrat Disdik Kab. Soppeng

Tabel 25. Profil Komponen Kognitif Responden Birokrat Disdik Soppeng

		F	Percent	Valid Percent	Cumulative Percen
Valid	STS	4	1,1	1,1	1,1
	TS	55	15,7	15,7	16,8
	S	179	51,0	51,0	67,8
	SS	113	32,2	32,2	100,0
	Total	351	100,0	100,0	

Tabel 26. Profil Komponen Afektif Responden Birokrat Disdik Soppeng

		F	Percent	Valid Percent	Cumulative Percen
Valid	STS	7	1,4	1,4	1,4
	TS	58	11,3	11,3	12,7
	S	278	54,2	54,2	66,9
	SS	170	33,1	33,1	100,0
	Total	513	100,0	100,0	

Tabel 27. Profil Komponen Konatif Responden Birokrat Disdik Soppeng

		F	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	6	1,2	1,2	1,2
	TS	64	12,5	12,5	13,6
	S	281	54,8	54,8	68,4
	SS	162	31,6	31,6	100,0
	Total	513	100,0	100,0	

10. Data Respon Bupati Soppeng

Tabel 28. Profil Komponen Kognitif Respon Bupati Soppeng

		F	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	5	18.5	18.5	18.5
	S	17	63.0	63.0	81.5
	SS	5	18.5	18.5	100.0
	Total	27	100.0	100.0	

Tabel 29. Profil Komponen Afektif Respon Bupati Soppeng

		F	Percent	Valid Percent	Cumulative Percen
Valid	S	8	61.5	61.5	61.5
	SS	5	38.5	38.5	100.0
	Total	13	100.0	100.0	

Tabel 30. Profil Komponen Konatif Respon Bupati Soppeng

		F	Percent	Valid Percent	Cumulative Percen
Valid	TS	1	10.0	10.0	10.0
	S	8	80.0	80.0	90.0
	SS	1	10.0	10.0	100.0
	Total	10	100.0	100.0	

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, jelas bahwa ketiga komponen sikap sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya adalah selaras dan konsisten, dimana terbukti secara empiris jawaban responden terhadap ketiga komponen sikap yang terdapat dalam instrument penelitian menunjukkan rata-rata persentase di atas 82% merupakan respon positif (*favorable*) terhadap objek sikap yang harus direspon/dijawab oleh responden. Hal ini sejalan dengan pendapat Azwar (1995) yang mengatakan bahwa apabila dihadapkan pada satu aspek sikap yang sama, maka ketiga komponen itu harus mempolakan arah sikap yang seragam. Apabila salah satu dari ketiga komponen tersebut tidak konsisten dengan yang lain, maka akan terjadi ketidakselarasan yang menyebabkan timbulnya mekansime perubahan sikap sedemikian rupa sehingga konsistensi itu tercapai kembali. Prinsip inilah yang banyak dimanfaatkan dalam manipulasi sikap guna mengalihkan bentuk sikap tertentu menjadi bentuk yang lain, yakni dengan memberikan informasi yang berbeda mengenai objek sikap yang dapat menimbulkan inkonsistensi diantara komponen-komponen sikap seseorang.

Azwar (1995) lebih lanjut menjelaskan bahwa melalui proses interaksi sosialnya, individu bereaksi membentuk pola sikap tertentu terhadap berbagai objek psikologis yang dihadapinya. Objek psikologis dalam penelitian ini adalah penyandang disabilitas dengan berbagai permasalahannya dan layanan pendidikan inklusif. Sikap terhadap penyandang disabilitas (ABK) dan sikap terhadap kebutuhan

layanan pendidikan inklusifnya merupakan salah satu contoh sikap sosial. Sementara menurut Mar'at (1984), sikap diartikan sebagai suatu konstruk untuk memungkinkan terlihatnya suatu aktivitas. Manifestasi sikap tidak dapat langsung dilihat, akan tetapi harus ditafsirkan terlebih dahulu sebagai tingkah laku yang masih tertutup. Secara operasional pengertian sikap menunjukkan konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap kategori stimulus tertentu dan dalam penggunaan praktis, sikap sering dihadapkan dengan rangsang sosial dan reaksi yang bersifat emosional.

SIMPULAN

Gambaran komponen kognitif guru ditunjukkan oleh persentase sebesar 83,54%, Birokrat Disdik 83,2%, dan Bupati 81,5%. Besaran persentase tersebut menunjukkan tingkat *beliefs*, ide dan konsep serta pengetahuan reseponden yang mendukung sikap positif mereka terhadap objek psikologis yang mereka sikapi, yaitu permasalahan yang terkait penyandang disabilitas (ABK) dan kebutuhan layanan Pendidikan Inklusifnya.

Gambaran komponen afektif guru sebesar 86,96%, birokrat Disdik 87,3%, dan Bupati 100%. Besaran persentase tersebut menunjukkan tingkat kecenderungan perasaan atau emosional subjektif responden untuk memberikan dukungan positif terhadap penyandang disabilitas (ABK) dan kebutuhan layanan Pendidikan Inklusif yang semestinya. Gambaran komponen konatif guru sebesar 84,13%, birokrat Disdik sebesar 86,4%, Bupati 90%. Besaran angka persentase tersebut menunjukkan kecenderungan bertingkah laku responden untuk memberikan dukungan terhadap penyandang disabilitas (ABK) & kebutuhan layanan pendidikan inklusif bagi mereka.

Implikasi dari temuan penelitian ini adalah: (1) Kepala Daerah berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan layanan pendidikan yang ramah dan berkualitas tanpa kecuali, sehingga diperlukan kebijakan yang dapat mendorong terciptanya praktek pendidikan yang inklusif pada semua tingkatan lembaga pendidikan, sebagai salah satu syarat suatu Kota/Kabupaten dapat disebut sebagai Kota/Kabupaten yang layak/ramah anak, (2) Guru atau pendidik di Kabupaten Soppeng seharusnya mendapatkan sosialisasi tentang konsep dan filosofi Pendidikan Inklusi serta mendapatkan pelatihan cara mengidentifikasi dan mengasesmen anak yang menyandang disabilitas (ABK), cara mendisain program pembelajaran individual berbasis kurikulum nasional, serta bimbingan teknis (BIMTEK) tentang cara menerapkan layanan pendidikan inklusif di sekolah. (3) Dinas pendidikan Kabupaten Soppeng sebagai *leading sector* yang menterjemahkan dan merealisasikan visi dan misi Bupati dalam bidang pendidikan, harus memastikan bahwa benar-benar terwujud praktek pendidikan dan pembelajaran yang ramah bagi semua anak dan non diskriminatif, sehingga birokrat/ASN Disdik juga perlu mendapatkan sosialisasi agar mendapatkan pemahaman yang benar tentang pendidikan inklusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, S. (1995). *Sikap Manusia-Teori dan Pengukurannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiyanto, dkk. (tanpa tahun), *Modul Training of Trainers (ToT) Pendidikan Inklusif-Kemitraan Australia Indonesia*, Jakarta: Depdiknas.
- Budiyanto (2005). *Pengantar Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Lokal*. Jakarta: DIRJEN DIKTI.
- Creswell, John W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, California: Sage Publications.
- Friend, M. (2005). *Special Education-Contemporary Perspectives for School Professionals*, Boston: Pearson Education.
- Mar'at (1984). *Sikap Manusia Perubahan serta Pengukurannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sunardi. (2000). *Paradigma Baru Dalam Pendidikan Luar Biasa*. Makalah.